

**ANALISIS KEBUTUHAN
SISTEM/MODEL PEMBELAJARAN
PENGELOLAAN DASAR PERPUSTAKAAN SEKOLAH
BAGI PARA PETUGAS PERPUSTAKAAN SD DAN SMP DI BANTEN
Oleh : Ali Winata, M.Pd**

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah investasi yang tak terbatas oleh waktu dan merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa. Pembangunan suatu bangsa dapat berjalan dan berhasil dengan baik apabila dilakukan oleh manusia yang berkualitas. Kesadaran pemerintah akan pentingnya pendidikan semakin tinggi dengan disediakannya anggaran belanja negara untuk pendidikan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tekat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara harus disertai dengan pembangunan manusia yang kualitas. Hal itu merupakan landasan yang berarti untuk menciptakan mutu pendidikan di negara ini dengan jelas. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen serta Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu tentunya harus ditopang oleh kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, proses belajar mengajar, dan fasilitas yang mendukungnya. Keberhasilan menciptakan keluaran siswa yang berkualitas dari suatu lembaga pendidikan merupakan keharusan bagi penyelenggara sekolah di negara ini. Dalam proses pembelajaran selain tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki peranan penting untuk keberhasilan belajar siswa, sumber belajar yang lain juga memiliki peranan penting sebagai penunjang dalam keberhasilan proses pembelajaran. Dalam proses peningkatan hasil belajar siswa, disamping diberikan proses pembelajaran yang menggairahkan aktivitas siswa di kelas, tentu juga dituntut adanya penyediaan sumber belajar sebagai penunjangnya di lingkungan sekolah.

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa yang memegang peranan penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sebagai sumber belajar, perpustakaan merupakan pusat informasi pengetahuan yang terdekat dan tercepat yang dapat diakses oleh para siswa. Keberadaan perpustakaan di sekolah memberikan

dukungan yang berarti dalam menciptakan kultur sekolah yang kondusif untuk belajar. Siswa dapat bereksplorasi mencari informasi pengetahuan yang dirasakan kurang dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, perpustakaan dapat dijadikan sarana yang efektif dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka pikirannya, mengembangkan semua bakat dan membiasakan diri memperkaya pengetahuan dengan usahanya sendiri. Tentu saja hal tersebut memerlukan suatu proses pembelajaran yang berdasarkan integrasi dan koordinasi antara semua komponen yang ada di sekolah.

Di era globalisasi saat ini rasanya dipandang perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan perpustakaan di sekolah yang dapat mengemban fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi rekreatif, dan fungsi riset sehingga pada akhirnya perpustakaan dapat berperan sebagai “*Center of Learning*”. Berkenaan dengan hal tersebut, penting kiranya adanya upaya yang berusaha dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevitalisasi kembali peranan perpustakaan di sekolah dalam rangka menciptakan siswa kita untuk melek informasi di era globalisasi. Dengan memahami informasi secara benar, dan mengaplikasikan sesuai dengan kemampuan, maka diharapkan melalui generasi muda kita yang dimulai dari siswa di sekolah nantinya dapat menciptakan bangsa dan negara ini akan menjadi lebih makmur dan berkeadilan dan yang lebih penting, masyarakat dapat memilih dan mencerna dengan bijak segala informasi baik yang bernilai membangun atau merusak.

B. PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Pertama kali yang kita lihat apabila memasuki sebuah perpustakaan adalah jajaran buku dan bahan pustaka lain yang tersusun secara rapih di rak buku. Buku tersebut diatur menurut suatu sistem tertentu sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk menemukan kembali bahan pustaka yang diperlukan. Anggapan bagi orang awam tentunya menyatakan perpustakaan adalah hanya sebatas tempat untuk menyimpan dan membaca buku. Bila kita merujuk kepada kamus “*The Oxford English Dictionary*”, perpustakaan yang dalam bahasa Inggris berarti “*library*” merupakan suatu tempat buku-buku diatur untuk dibaca, dipelajari atau dipakai sebagai bahan rujukan. memasuki abad ke-19 pengertian perpustakaan berkembang menjadi suatu gedung atau sejumlah ruangan yang berisi koleksi buku yang dipelihara dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu. Pada tahun 1970, The American Library Association memaknai perpustakaan tidak hanya sebatas gedung atau ruangan yang mengkoleksi buku

tetapi memberikan makna yang lebih luas yaitu menjadi sebagai pusat media, pusat belajar, pusat sumber pendidikan, pusat informasi, pusat dokumenstasi dan pusat rujukan. Dalam pengertian perpustakaan yang telah dijabarkan diatas tersirat fungsi perpustakaan pada umumnya, yaitu sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.

Berdasarkan sifat dan golongan perpustakaan secara umum terbagi dalam sebuah bentuk perpustakaan khusus dan perpustakaan umum. Dimana dari kedua perpustakaan tersebutlah berkembang istilah lain yang disesuaikan dengan cara pengelolaan, pengguna, tujuan, teknologi yang digunakan, pengetahuan yang dikemas, serta tujuan perpustakaan didirikan. Perpustakaan khusus biasanya juga mempunyai karakteristik khusus apabila dilihat dari fungsi, subyek yang ditangani, koleksi yang dikelola, pemakai yang dilayani, dan kedudukannya. Sehingga dari hal tersebut nantinya akan terlihat dengan jelas perbedaannya dengan perpustakaan-perpustakaan pada umumnya.

	PERPUSTAKAAN KHUSUS	PERPUSTAKAAN UMUM
Kedudukan	Bernaung di bawah badan/ instansi/lembaga/organisasi tertentu seperti organisasi profesi, perusahaan, pusat studi, departemen, dsb	Bernaung di bawah lembaga / badan / organisasi publik seperti pemerintah, yayasan social, dsb
Cakupan Subyek	Berkaitan erat dengan bidang/subyek tertentu (khusus) dari berbagai disiplin ilmu.	Mencakup bermacam subyek / bidang ilmu pengetahuan
Koleksi	Mempunyai jenis-jenis koleksi yang mempunyai informasi tertentu (bidang tertentu tergantung dari spesifikasi perpustakaan) dan termuat dalam berbagai media.	Biasanya koleksi berupa buku dan pamlet dengan cakupan bidang koleksi yang lebih luas dan umum
Pemakai	Mempunyai / Melayani pemakai dalam kelompok tertentu	Mempunyai / Melayani pemakai secara umum / luas
Fungsi	Berfungsi untuk menyimpan, menemukan, memberikan dan menyebarkan informasi secara cepat baik untuk untuk tujuan pendidikan, rekreasi dan penelitian.	Berfungsi untuk memberikan fasilitas baca dan pinjam untuk tujuan pendidikan, rekreasi dan penelitian.

Perpustakaan sekolah merupakan bagian dari perpustakaan khusus. Layanan perpustakaan sekolah harus dapat memberikan nilai lebih kepada pengguna yaitu warga sekolah terutama para siswa. Untuk itu pengelola perpustakaan sekolah perlu selalu memberikan alternatif-alternatif dalam penyampaian informasi kepada siswanya. Aspek layanan menjadi penting untuk diperhatikan dikarenakan tuntutan kebutuhan penyajian informasi yang cepat, tepat dan terbaru selalu ada. Jenis layanan perpustakaan sekolah dapat bersifat terbuka maupun tertutup, tergantung pada kebijakan sekolah, pengelola dan

tipe penggunaannya. Namun kebanyakan perpustakaan sekolah menerapkan sistem terbuka dengan akses terbatas. Hal ini untuk lebih memberikan peluang kepada penggunaan yang lebih luas namun tetap terkontrol. Terbuka artinya siapapun dapat memanfaatkan koleksi yang ada baik warga sekolah maupun warga di luar sekolah, sedangkan akses terbatas adalah pengaturan terhadap proses pemanfaatan koleksi seperti fasilitas pinjam, fasilitas baca, fotokopi, dan sebagainya lebih menitik beratkan kepada warga sekolah saja.

Perpustakaan Sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0103/O/1981, tanggal 11 Maret 1981, mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah
- b. Pusat Penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas dan imajinasinya.
- c. Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu luang (buku-buku hiburan)

Dalam sebuah lembaga pendidikan, keberadaan perpustakaan sekolah harus memberikan peranan yang lebih dalam mendukung proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Untuk itu perlu adanya sinergi yang kuat antara kebijakan dalam kelembagaan sekolah dengan pengelola perpustakaan sekolah terutama untuk memberikan daya dukung dalam mencapai tujuan dan misi sekolah. Oleh karenanya, peran kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan serta peran pengelola perpustakaan sebagai roda penggerak perpustakaan serta peran seluruh warga sekolah terutama para siswa sebagai pengguna tidak bisa saling dipisahkan.

C. ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN PENGELOLAAN DASAR PERPUSTAKAAN DASAR SEKOLAH

a. Permasalahan

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 pasal 35 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa setiap sekolah diwajibkan memiliki perpustakaan dan berikutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 42 ayat (2) diisyaratkan agar SD/MI atau sederajat sekurang-kurangnya memiliki tenaga perpustakaan dan ruang perpustakaan guna menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis data Kependidikan yang diolah oleh Seksi Data dan Informasi LPMP Banten yang berasal dari data aplikasi PADAMU NEGERI yang dikeluarkan oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMKPMP) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2014 dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

Data Pokok Tenaga Kependidikan Di Provinsi Banten

KARAKTERISTIK	Kab. Lebak	Kab. Pandeglang	Kab. Serang	Kab. Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangerang	Kota Tangsel	Grand Total
JENJANG SEKOLAH									
TK	19	28	5	87	19	34	210	67	469
SD	345	564	703	626	166	225	895	196	3720
SMP	497	536	484	686	217	290	665	175	3550
SMA	224	196	245	378	92	137	387	90	1749
SMK	140	151	137	297	100	184	447	64	1521
SLB	8	14	0	0	0	14	8	2	46
JML	1233	1489	1574	2074	594	884	2612	594	11054
Bendahara	38	44	55	79	19	31	110	30	406
Kepala Laboratorium	1	1	0	0	0	1	8	0	11
Kepala Perpustakaan	6	11	13	10	3	6	19	10	78
Kepala Tata Usaha	71	92	145	94	39	72	176	56	745
Ketua Program Keahlian	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Laboran	5	3	8	10	9	6	37	4	82
Pelaksana Urusan	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Pengemudi	2	1	3	5	2	2	10	2	27
Penjaga Sekolah	291	421	396	517	162	170	670	93	2720
Pesuruh	92	85	42	134	52	39	189	27	660
Pustakawan	41	111	54	68	39	38	100	25	476
Staf Tata Usaha	642	663	792	963	238	441	989	274	5002
Teknisi Laboratorium	1	5	4	17	3	8	39	10	87
Tenaga Kebersihan	31	31	54	139	23	59	252	57	646
Tidak Menjabat	9	18	4	24	1	5	2	3	66
Tukang Kebun	3	3	4	11	4	6	11	3	45
JML	1233	1489	1574	2074	594	884	2612	594	11054

(sumber : PADAMU_050814 status aktif)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dari 11.054 orang tenaga kependidikan hanya terdapat 78 kepala perpustakaan dan 476 tenaga pustakawan dari 8.706 sekolah dan 1.832.853 siswa yang perlu mendapatkan dukungan sumber belajar melalui perpustakaan di sekolah yang ada di provinsi Banten. Dan pustakawan yang ada pun saat ini hampir sebagian besar tidak memiliki latar belakang tentang keperpustakaan dan bukan PNS. Sebagian besar petugas perpustakaan yang ada di sekolah adalah guru yang merangkap sebagai petugas perpustakaan. Biasanya guru yang ditunjuk adalah guru bahasa dan guru

dibidang kesenian. Kurangnya tenaga perpustakaan di Banten menurut asumsi penulis berhubungan juga dengan kenyataan yang ada di lapangan, bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan, walaupun ada perpustakaan sekolah hanya dijadikan bangunan pelengkap saja bagi sekolah. Perpustakaan dipandang sebelah mata dan menjadi prasyarat saja bagi pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan.

Keberadaan perpustakaan tidak difungsikan sebagaimana mestinya dalam memberikan pelayanan informasi bagi siswa. Banyak sekolah memiliki gedung perpustakaan, tetapi kurang memperhatikan mengelolanya dalam memberikan layanan yang terbaik sebagai penunjang proses pembelajaran yang tercepat dan terdekat untuk diakses oleh siswa. Selama ini perpustakaan yang terdapat di sekolah belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Masalah yang terbesar dijumpai adalah karena pelayanan dan pengelolaan perpustakaan di sekolah tidak berjalan dengan baik serta koleksi yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan para siswa. Masalah yang lain adalah tidak adanya koordinasi guru dengan pihak perpustakaan dalam menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri dengan memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin sebagai sarana memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan secara luas dan mendalam. Selain itu, permasalahan yang lebih mendasar lagi adalah masih sangat kurangnya sumber daya manusia di sekolah yang memiliki kompetensi yang cukup tentang masalah keperpustakaan ini.

Berjalan atau tidaknya sebuah perpustakaan sekolah sangat bergantung pada komitmen sekolah. Bahkan kecenderungan sekolah menugaskan pengelola perpustakaan menggunakan motif yang berbeda beda kepentingan, misalnya penugasan orang-orang yang ditugaskan memang sesuai dengan kemampuan dan tidak ada masalah dan siap melaksanakan tugas tetapi mereka harus siap menanggung terpojokkan di ruang perpustakaan karena tidak pernah dibina lebih lanjut. Bentuk penugasan yang lain adalah menugaskan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak mengerti akan perpustakaan dan juga kurang sependapat dengan pihak sekolah sehingga dikucilkan di perpustakaan. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya penugasan fiktif maksudnya penugasan terjadi karena di mungkinkan guru yang kekurangan jam mengajar ditutupi kekurangan tersebut dengan bertugas sebagai pengelola perpustakaan, sehingga angka kredit jabatan guru tidak terganggu kepangkatan dapat terus meningkat.

Analisis Permasalahan Perpustakaan Sekolah

Masalah	Indikator Masalah	Penyebab	Pemecahan
Keberadaan perpustakaan di sekolah dipandang sebelah mata	Bangunan perpustakaan yang tidak layak bahkan tidak memiliki perpustakaan	<p>Kurangnya inisiatif dari sekolah untuk membangun ruangan perpustakaan secara mandiri atau memanfaatkan ruangan yang ada untuk dijadikan perpustakaan</p> <p>Sekolah selalu saja menunggu bantuan dari pemerintah dalam upaya mendirikan perpustakaan sekolah</p>	<p>Perlu adanya upaya sosialisasi antara warga sekolah, komite dan masyarakat akan pentingnya perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah sehingga dapat bersama-sama membangun perpustakaan melalui inisiatif sendiri</p> <p>Perlu adanya upaya untuk membangun budaya pentingnya perpustakaan bagi penunjang pembelajaran di sekolah dengan memaksimalkan perpustakaan yang telah ada di sekolah</p>
	Dukungan sekolah terhadap program kerja perpustakaan yang sangat lemah	<p>Sekolah masih beranggapan perpustakaan hanya sebagai pendukung yang kurang potensial bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah</p> <p>Perpustakaan masih dianggap sebagai organisasi yang terpisah sehingga dalam berbagai kegiatan program belum mengikutsertakan semua warga sekolah dalam tujuan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut</p>	<p>Perlu adanya upaya sosialisasi antara dinas pendidikan, warga sekolah, komite dan masyarakat akan pentingnya perpustakaan, khususnya dalam upaya menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi bagi siswa dalam mendukung proses pembelajaran</p> <p>Perlu adanya sinkronisasi seluruh program di sekolah dengan selalu mengikutsertakan peran perpustakaan baik dari sisi curriculum maupun yang lainnya.</p>
		Sekolah masih belum memberikan dukungan yang optimal terhadap pemberian dana operasional perpustakaan	Sekolah perlu mengoptimalkan dana yang ada di sekolah melalui BOS , dimana seharusnya sekolah mengalokasikan

			dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
Pengelolaan perpustakaan sekolah yang kurang optimal	Layanan perpustakaan yang kurang optimal	<p>Bahan koleksi yang sangat terbatas dan kadang sudah kadaluarsa</p> <p>Keadaan perpustakaan yang tidak nyaman untuk dikunjungi karena kurangnya perawatan baik dari perawatan koleksi maupun perawatan ruangan</p> <p>Kurangnya promosi program dari pengelola perpustakaan kepada para siswa tentang pentingnya peranan perpustakaan bagi proses pembelajaran siswa di kelas</p>	<p>Sekolah harus mengusahakan untuk mengadakan bahan pustakan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa yang terkini</p> <p>Sekolah harus menciptakan atau menata ruangan perpustakaan yang nyaman sehingga siswa merasa betah di perpustakaan untuk mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas</p>
	Pengelola perpustakaan sekolah yang kurang mumpuni dari sisi kompetensi	<p>Hampir sebagian besar sekolah belum memiliki tenaga pustakawan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebagai pustakawan</p> <p>Belum adanya pengangkatan khusus tenaga pustakawan di sekolah yang diangkat dari pemerintah daerah untuk sekolah</p>	<p>Perlu adanya permintaan kepada dinas pendidikan untuk meyarankan agar terdapat pengangkatan tenaga perpustakaan yang sesuai latar belakang pendidikannya di sekolah</p> <p>Perlu adanya pembinaan bagi pegawai yang ditugaskan diperpustakaan bila ia seorang honorer maupun dari guru yang merangkap tugasnya sebagai pengelola perpustakaan akan</p>

		Banyak sekolah yang mengangkat tenaga perpustakaan berasal dari guru yang ada karena kekurangan jam mengajar dan kurang memiliki kompetensi tentang perpustakaan	kompetensi perpustakaan, Baik yang dilakukan oleh dinas, pihak sekolah maupun tugas mandiri dari guru yang ditugaskan.
--	--	--	---

Keberadaan perpustakaan di sekolah kita memang dirasakan belum semuanya berjalan dengan optimal. Dari beberapa sekolah yang dikunjungi penulis dalam tahun 2014 dan 2015 seiring dengan kegiatan piloting sekolah yang diadakan oleh LPMP Banten. Untuk sekolah SD maupun SMP dirasakan masih jauh dari kondisi ideal akan keberadaan perpustakaannya. Rata-rata mereka tidak memiliki ruangan tersendiri yang terfokus untuk ruangan perpustakaan bahkan di beberapa sekolah belum memiliki ruangan perpustakaan. Bilapun ada ruangan perpustakaan menyekat dari ruangan lain dan masih menyatu dengan ruangan yang lain. Ruang dan fasilitas yang kurang memadai/representatif menjadi penyebab utama peran perpustakaan di sekolah tidak berjalan secara optimal, ditambah lagi dengan koleksi buku bahan bacaan yang pada umumnya masih dominan pada buku-buku paket yang terkadang juga sudah kadaluarsa. Buku-buku selain buku paket masih sangat terbatas jumlahnya serta keberadaan buku tersebutpun dirasakan kurang menarik untuk dibaca oleh warga sekolah. Dengan kondisi tersebut, perpustakaan belum mampu menjadi pilihan favorit siswa dan guru dalam rangka mencari informasi tambahan bagi pendukung pembelajaran mereka di dalam kelas.

Secara umum permasalahan utama perpustakaan sekolah ini adalah dari sisi manajemen sekolah yang kurang mementingkan keberadaan perpustakaan di sekolah. Dukungan manajemen sekolah bagi tumbuh-kembangnya perpustakaan masih terlihat sangat lemah, sehingga alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan dari sekolah pun tidak memadai. Permasalah perpustakaan sekolah ini diperumit dengan kurangnya petugas khusus pengelola perpustakaan yang sesuai bidang keilmuannya. Petugas perpustakaan banyak yang bukan seorang pustakawan atau tenaga yang terdidik/terlatih dengan kemampuan yang relevan, sehingga pengelolaan kurang profesional. Hal ini tentunya akan berdampak pada rendahnya minat baca para siswa di sekolah tersebut,

karena para siswa tentunya akan kesulitan untuk mencari bahan bacaan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang diajarkan bagi mereka sebagai sumber informasi yang utama yang ada di sekolah.

Dalam upaya meningkatkan peran tupoksi perpustakaan sekolah pada level manajemen sekolah, maka tentunya perlu adanya upaya kerja keras dengan menempatkan unit perpustakaan yang diposisikan secara struktural langsung di bawah kepala sekolah yang sejajar peranannya dengan unit lain yang ada di sekolah. Manajemen sekolahpun perlu untuk menjaminkan anggaran rutin perpustakaan dengan mengalokasikan anggaran rutin yang memadai dalam Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah(RAPBS), dengan memasukan pengelola perpustakaan sebagai salah satu tim penyusun RAPBS maupun penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sekolah. Oleh karena itu tentunya pihak manajemen sekolah perlu untuk mempertimbangkan masalah penempatan tenaga Perpustakaan yang unggul sebagai pengelola, tidak sekedar pengelola perpustakaan tetapi minimal memiliki kompetensi tentang keperpustakaan.

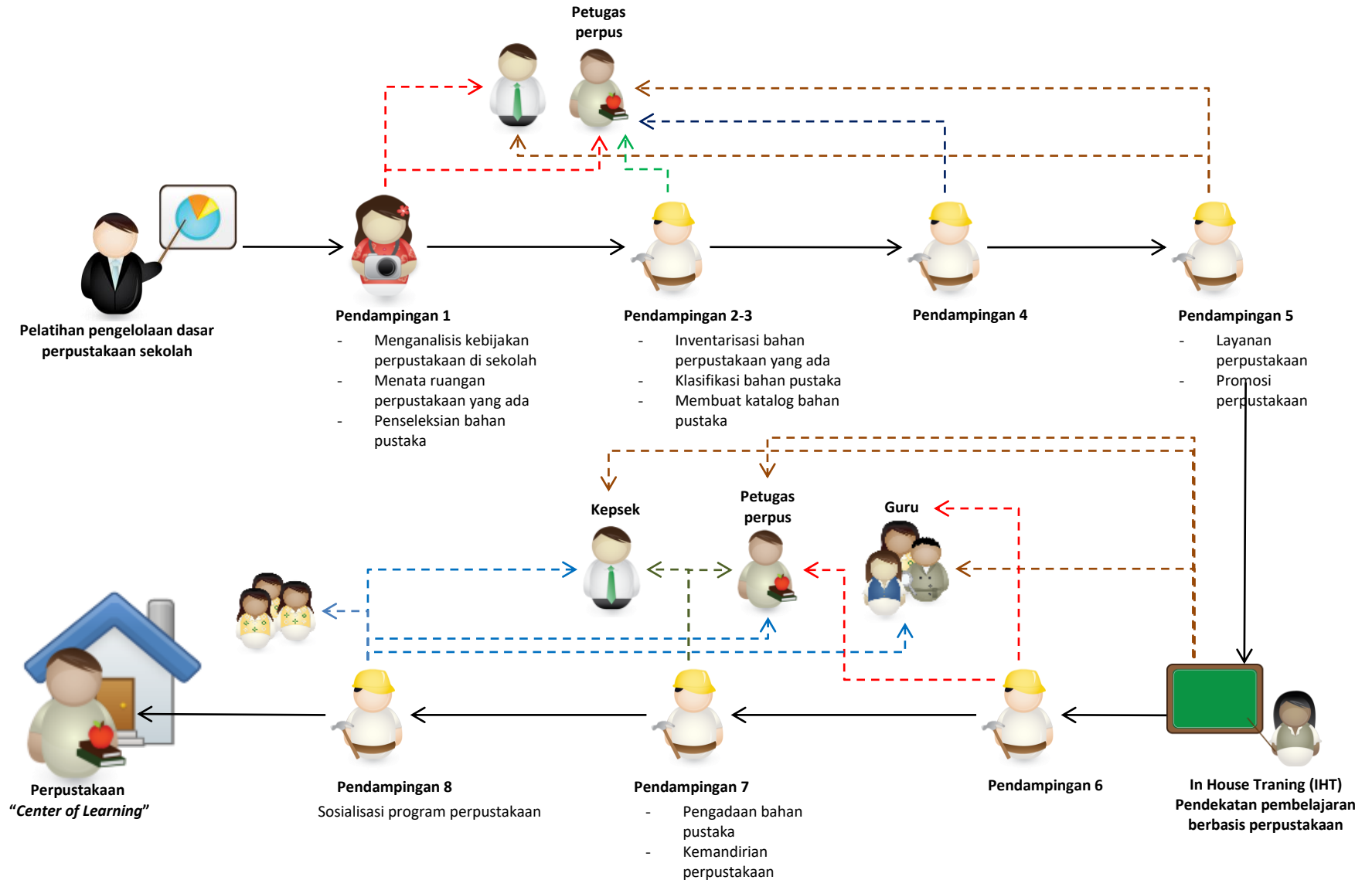
b. Analisis Sistem Model Pembelajaran Pengelolaan Dasar Perpustakaan Sekolah

Dalam proses pembelajaran di sekolah, selain guru yang memiliki peranan penting untuk keberhasilan belajar siswa di dalam kelas, maka sumber belajar yang lain juga memiliki peranan penting sebagai penunjang dalam keberhasilan proses pembelajaran. Dalam proses peningkatan hasil belajar siswa, disamping diberikan proses pembelajaran yang menggairahkan aktivitas siswa di kelas, tentu juga dituntut adanya penyediaan sumber belajar sebagai penunjangnya di lingkungan sekolah. Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa yang memegang peranan penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan fakta dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dipandang perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan perpustakaan di sekolah yang dapat mengemban fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi rekreatif, dan fungsi riset sehingga pada akhirnya perpustakaan dapat berperan sebagai "*Center of Learning*" di sekolah.

Salah satu alternatif pemecahan dalam rangka memberikan proses pembelajaran pengelolaan dasar perpustakaan di sekolah bagi para pendidik dan tenaga pendidik di sekolah adalah dengan menjalankan model pembelajaran secara sistematis mengenai pengelolaan dasar perpustakaan sekolah bagi para guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan mengelola perpustakaan. Dengan adanya upaya model pembelajaran yang sistematis, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, terpadu, dan terpola dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan di sekolah, sehingga mampu

meningkatkan kompetensi petugas perpustakaan sekolah yang minim akan kompetensi keperpustakaan dalam merencanakan, mengelola, dan memberikan layanan perpustakaan kepada seluruh komponen sekolah dengan baik. Di bawah ini penulis gambarkan tentang sistem/model pembelajaran pengelolaan dasar perpustakaan sekolah bagi para petugas perpustakaan SD dan SMP di Banten secara berkelanjutan.

Sistem/Model Pembelajaran Pengelolaan Dasar Perpustakaan Sekolah Bagi Petugas Perpustakaan SD dan SMP di Banten



c. Strategi Pelaksanaan Sistem/Model Pembelajaran Pengelolaan Dasar Perpustakaan Sekolah

Sistem/model diatas merupakan salah satu alternatif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kompetensi guru secara sistematis untuk masalah peningkatan pengelolaan perpustakaan di sekolah. Uraian sistem/model tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan pengelolaan dasar perpustakaan sekolah

Pelatihan ini merupakan tahap awal dari proses pembelajaran yang berkelanjutan bagi sekolah yang pesertanya merupakan para petugas perpustakaan dari berbagai sekolah. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi petugas perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Sasaran pelatihan ini untuk para guru maupun tenaga kependidikan yang ditugaskan menjadi pengelola perpustakaan di sekolahnya baik untuk tingkat SD maupun SMP. Dalam pelatihan ini akan dibahas tentang dasar-dasar pengelolaan perpustakaan di sekolah mulai dari kebijakan perpustakaan sekolah, penseleksian bahan pustaka, inventarisasi, klasifikasi, layanan perpustakaan sampai kemandirian perpustakaan. Pada akhir pelatihan, peserta mendapatkan tugas *On Job Learning* (OJL) tentang bagaimana penerapannya di sekolah tentang materi hasil pelatihan yang telah didapatkan. Pelatihan ini dilakukan selama 3 hari dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah.

2. Pendampingan 1 ke sekolah

Petugas dari pemerintah pusat dalam hal ini LPMP maupun dari pemerintah daerah dalam hal ini para pengawas memberikan pendampingan, bimbingan dan pembinaan secara tatap muka tentang hasil *On Job Learning* (OJL) yang telah guru lakukan di sekolah. Pendampingan ke ini akan mendiskusikan tentang analisis kebijakan perpustakaan yang selama ini telah ada di sekolah, baik dari struktur organisasi, tupoksi maupun program apa yang telah dilakukan khusus kepada kepala sekolah dan petugas perpustakaan. Berikutnya melakukan observasi ke ruangan perpustakaan untuk melihat keadaan perpustakaan dari sisi tata ruang dan perlengkapan perpustakaan. Dan selanjutnya memberikan penguatan kepada petugas perpustakaan tentang bagaimana penseleksian bahan pustaka yang ada untuk dipilah antara bahan pustaka buku dan non buku.

Pendampingan ini dilakukan dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan dan kesiapan serta kebutuhan sekolah.

3. Pendampingan 2 - 3 ke sekolah

Petugas dari pemerintah pusat dalam hal ini LPMP maupun dari pemerintah daerah dalam hal ini para pengawas kembali memberikan pendampingan, bimbingan dan pembinaan lanjutan secara tatap muka dari lanjutan pendampingan sebelumnya kepada petugas perpustakaan di sekolah. Pendampingan ke 3 dan ke 4 ini akan membahas dan mendiskusikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi hasil penseleksian bahan pustaka. Selanjutnya melakukan kegiatan klasifikasi pengelompokan buku berdasarkan cirri-ciri tertentu dan berikutnya mendampingi dalam membuat catalog bahan pustaka sehingga berguna untuk mengetahui buku apa saja yang dimiliki perpustakaan sekolah berdasarkan klasifikasinya. Pendampingan ini dilakukan selama 2 kali dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah.

4. Pendampingan 4 ke sekolah

Pendampingan ke 4 ini akan membahas dan mendiskusikan pelaksanaan kegiatan penataan bahan pustaka ditempatnya (shelving) kepada petugas perpustakaan. Bahan pustaka terutama buku, diatur di rak dengan baik dan teratur sehingga waktu pemakai dalam mencari buku dapat dihemat. Karena itu buku di perpustakaan harus disusun dalam berbagai koleksi/urutan memenuhi kebutuhan pemakai sehingga mudah untuk ditemukan. Selanjutnya melakukan pendampingan dan berdiskusi tentang kegiatan preservasi bahan pustaka dari segi pemeliharaan lingkungannya dan pemeliharaan bahan pustakanya. Pendampingan ini dilakukan dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah.

5. Pendampingan 5 ke sekolah

Pendampingan ke 5 ini akan membahas dan mendiskusikan dengan kepala sekolah dan petugas perpustakaan tentang pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini meliputi sistem dan jenis layanan, keanggotaan dan bimbingan pemakai serta evaluasi layanan. Selanjutnya melakukan pendampingan dan berdiskusi tentang kegiatan bagaimana merancang kegiatan promosi perpustakaan kepada semua warga sekolah terutama kepada guru dan siswa. Pendampingan ini dilakukan dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah.

6. In House Training (IHT) Pendekatan Pembelajaran berbasis perpustakaan
IHT ini merupakan pelatihan lanjutan untuk memperkuat petugas perpustakaan dan para guru dalam mengoptimalkan peranan perpustakaan sebagai pusat informasi di sekolah dalam menunjang pembelajaran siswa di sekolah. Tujuan utama dari pelatihan tahap 2 ini adalah meningkatkan kompetensi guru dan petugas perpustakaan dalam mendesain pembelajaran yang berbasis perpustakaan. Dalam IHT ini akan dibahas tentang materi tentang model pembelajaran *inquiry*, *problem solving*, dan *project learning*. Pelatihan ini dilakukan selama 2 hari dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah.

7. Pendampingan 6 ke sekolah

Pendampingan ke 6 ini akan membahas dan mendiskusikan dengan kepala sekolah dan petugas perpustakaan serta perwakilan guru dalam menyusun program kerja perpustakaan. Program kerja perpustakaan ini ditujukan menjadi program kerja yang mengarah kepada guru agar dalam melaksanakan proses pembelajaran selalu dikaitkan dengan keberadaan dan fungsi perpustakaan sekolah. Selain itu program kerja yang diarahkan kepada siswa seperti untuk menumbuhkan minat baca dan sebagai tempat riset sederhana di sekolah dalam mengumpulkan datanya atau mencari sumber. Pendampingan ini dilakukan dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah.

8. Pendampingan 7 ke sekolah

Petugas dari pemerintah pusat dalam hal ini LPMP maupun dari pemerintah daerah dalam hal ini para pengawas kembali memberikan pendampingan, bimbingan dan pembinaan lanjutan secara tatap muka dari pendampingan sebelumnya kepada guru di sekolah. Pendampingan ke 7 ini akan membahas tentang bagaimana proses pengadaan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan sekolah terutama dengan kebutuhan program perpustakaan yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu dalam pendampingan ini juga akan mendiskusikan tentang bagaimana caranya membentuk kemandirian perpustakaan sekolah. Pendampingan ini dilakukan dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah.

9. Pendampingan 8 ke sekolah

Petugas dari pemerintah pusat dalam hal ini LPMP maupun dari pemerintah daerah dalam hal ini para pengawas kembali memberikan pendampingan, bimbingan dan pembinaan lanjutan secara tatap muka dari pendampingan sebelumnya kepada guru di sekolah. Pendampingan ke 8 ini akan membahas tentang proses sosialisasi program perpustakaan sekolah yang akan dilakukan. Dalam pendampingan ini tentunya langsung diadakan sosialisasi bersama warga sekolah untuk mensukseskan program perpustakaan di sekolah. Pendampingan ini dilakukan dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan sekolah.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan analisis kebutuhan sistem model pembelajaran pengelolaan dasar perpustakaan sekolah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk mengelola perpustakaan di sekolah secara sistematis untuk bidang pelayanan perpustakaan yang prima baik berupa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran pengelolaan perpustakaan di sekolah dengan merancang dan menyusun skema materi secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh pendidik dan tenaga pendidikan dalam mengikuti diklat ini.
3. Perlu kiranya pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadikan salah satu prioritas kebijakan utama untuk membangun ruangan perpustakaan di semua sekolah berikut koleksinya serta mengangkat fungsional pustakawan di setiap sekolah khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah agar dapat mengelola perpustakaan dengan baik.
4. Perlu kiranya adanya pengembangan guru dalam meningkatkan kompetensinya melaksanakan pembelajaran yang berbasis perpustakaan sekolah sehingga dapat memotivasi siswa dalam menggunakan fungsi perpustakaan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Rompas, YP. 1985. *Pengantar Organisasi Perpustakaan*. Jakarta: Lembaga Pusat Dokumentasi dan Informasi.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Proyek Pengembangan Perpustakaan.

Sumardji, P. 1988. *Perpustakaan: Organisasi dan Tata Kerjanya*. Yogyakarta : Kanisius.

_____. 1992. *Perpustakaan Sekolah: petunjuk Untuk Membina, Memakai dan Memelihara Perpustakaan di Sekolah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

_____. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1992.

_____. *Pedoman Perpustakaan Sekolah IFLA/UNESCO*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006.

Sri Wahyu Hastarini. *Dampak Perpustakaan Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat* .
Mimbar Pustaka Jatim No 01/Th./januari-Maret 2007[p.16-17]